

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dewata, Mukti, Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Utomo, Tri, 2002, *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Navila, Yogyakarta.

Yudoyono, Bambang, 2016, *Jogja Memang Istimewa*, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta.

2. Artikel Jurnal

Restanti, Dita, Binov Handitya, "Implementasi Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Wonoyoso Kabupaten Semarang)", *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, September 2023.

Abrianto, Bagus, dan Muhammad Fikri "Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan", *Pandecta*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.

Anggraeni, Tyas, "Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, April 2012.

Bayu, Anggalih, Kaimin, Amal, Khandiq, "Problematika Perumahan Perkotaan Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 13, No. 1, Juni 2019.

Fahmi, Fatahillah, "Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 2, Juli 2016.

Ghalib, Andi, Yasin, "Tindakan Hukum Pemerintah Desa Terhadap Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hak", *Justitiable*, Vol. 5, No. 2, Januari 2023.

Laksono, Fajar, Helmi Kasim, Nallom Kurniawan, Nuzul Qur'aini Mardiyah, Ajie Ramdan, dan Siswantana Putri Rachmatika, "Status Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, Desember 2011.

Tilman, Antonio, Mujiburohman, Dewi, "Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Mei 2021.

Wirawan, Vani. "Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019.

Wirawan, Fajar, Ninik Sutarni, Fauzan Hidayat, "Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 55).

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35)